

GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA KEUANGAN, DAN PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT: STUDI PADA SUBSEKTOR PERBANKAN DI BEI 2019–2023

Margareth Hasian Siagian¹⁾, Astrini Aning Widoretno^{2)*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur
email: margarethhasian@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur
email: astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effect of Good Corporate Governance and Financial Performance on the disclosure of sustainability reports in Indonesian banking companies. Even though POJK No. 51/POJK.03/2017 requires banks to implement sustainable finance, in practice the disclosure of environmental aspects is still far behind social and economic aspects. The purpose of this research is to test whether managerial ownership, independent commissioners, board of directors, and return on assets (ROA) influence the level of sustainability report disclosure. The study uses a quantitative method with secondary data from 15 banks listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019–2023, giving 75 firm-year observations. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that all variables have a effect. Managerial ownership gives the strongest influence, followed by independent commissioners, ROA, and the board of directors. The model explains 78.8% of the variation in disclosure. This research supports Stakeholder Theory, showing that governance and financial performance strengthen accountability to stakeholders. In practice, the findings suggest that stronger governance quality and financial performance can encourage banks to be more transparent and accelerate sustainable finance in Indonesia.

Keywords: Banking Sector; Financial Performance; Good Corporate Governance; Sustainability Report

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan pada pengungkapan sustainability report pada perusahaan perbankan di Indonesia. Meskipun telah diterbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan implementasi keuangan berkelanjutan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aspek lingkungan masih diungkap lebih rendah dibandingkan aspek sosial dan ekonomi. Variabel yang diujikan pada studi ini meliputi kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, serta return on assets (ROA). Studi ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan data sekunder dari 15 bank yang terdaftar di BEI periode 2019–2023, sehingga diperoleh 75 observasi firm-year. Analisis data dilaksanakan memanfaatkan regresi linear berganda. Temuan studi mengindikasikan bahwasanya seluruh variabel mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh paling kuat, diikuti oleh komisaris independen, ROA, dan dewan direksi. Model penelitian ini mampu menjelaskan 78,8% variasi pengungkapan. Secara teoretis, hasil ini memperkuat Stakeholder Theory dengan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dan kinerja keuangan saling melengkapi dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi regulator dan praktisi perbankan bahwa kualitas tata kelola dan kinerja keuangan perlu diperkuat untuk mendorong transparansi serta mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Sektor Perbankan; Sustainability report; Tata Kelola

*Corresponding author. E-mail: astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keberlanjutan bisnis menjadi isu yang semakin penting di era bisnis modern, di mana perusahaan bukan semata-mata dibebani kewajiban guna memperoleh laba, melainkan pula harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya (Tsabitha, Rahmadhani, Pebrianti, & Zakaria, 2024). Kepercayaan publik terhadap perusahaan kini menjadi aset berharga, sehingga transparansi dalam pengelolaan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kian ditekankan (Buallay, 2020). Di Indonesia, perhatian terhadap keberlanjutan telah ditegaskan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan entitas bisnis menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan sebagai wujud dari dedikasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

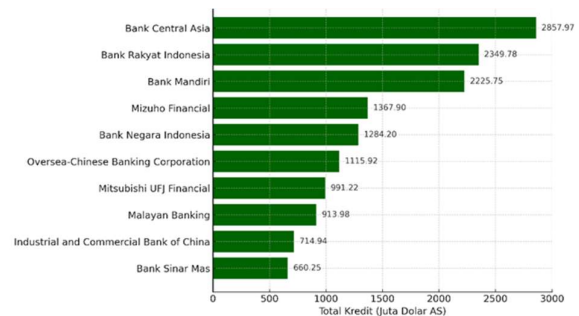
Peralihan menuju akuntabilitas keberlanjutan semakin ditegaskan dengan adanya POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mengelola implementasi keuangan berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan guna merancang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari kewajiban pelaporan tahunan. Selain itu, perbankan Indonesia juga mulai menerapkan standar internasional mencakup *Global Reporting Initiative* (GRI), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan *Principles for Responsible Banking* (PRB) agar selaras dengan praktik global.

Namun, implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor perbankan masih menghadapi tantangan besar. Laporan evaluasi TuK Indonesia bersama *Trisakti Sustainability Center* (2024) menunjukkan bahwa dari 37 bank yang diteliti, aspek lingkungan menjadi kategori dengan tingkat pengungkapan terendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik keuangan berkelanjutan belum optimal meskipun terdapat mandat regulasi.

Beberapa bank besar seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BCA bahkan masih menyalurkan

pembiayaan besar ke sektor berdampak lingkungan tinggi seperti kelapa sawit dan *pulp & paper*. Sebagai contoh, pada tahun 2021 BRI menyalurkan pembiayaan Rp19,6 triliun ke sektor *pulp & paper*, jauh melebihi pembiayaan ke UMKM. Rahmawati, pakar keuangan berkelanjutan, menegaskan bahwa hanya sekitar 0,8–0,9% total pembiayaan bank di Indonesia yang benar-benar dapat dikategorikan berkelanjutan.

Selain itu, laporan TuK Indonesia juga menemukan bahwa bank-bank domestik maupun asing masih menjadi kreditor utama perusahaan dengan izin usaha dicabut akibat masalah lingkungan. Pada periode 2017–2022, BCA, BRI, dan Mandiri tercatat sebagai kreditor terbesar perusahaan tersebut dengan nilai kredit miliaran dolar AS. Fakta ini memperlihatkan kontradiksi antara klaim penerapan prinsip ESG dengan praktik pembiayaan yang masih menimbulkan risiko lingkungan.



Gambar 1. Kreditor Utama Perusahaan dengan Izin Dicabut Tahun 2022

Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan masih menghadapi hambatan struktural. Hasil kajian Lemhannas RI (2023) juga menunjukkan bahwa hingga Februari 2022, sektor perbankan tetap memprioritaskan pembiayaan industri berdampak lingkungan besar seperti pertambangan dan penggalian, dengan total mencapai Rp158,13 triliun. Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup, menilai lemahnya implementasi keuangan berkelanjutan disebabkan orientasi nasional yang masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, lemahnya penegakan mekanisme

ESG, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Di samping itu, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di bidang perbankan juga menghadapi persoalan. Meskipun regulasi telah jelas, misalnya melalui SEBI No. 15/15/DPNP Tahun 2013, praktiknya masih menunjukkan kelemahan. Kasus-kasus seperti skandal Bank Bali (1999) dan Bank Century (2008) menggambarkan bagaimana lemahnya tata kelola dapat merusak reputasi dan stabilitas sistem keuangan.

Hasil *self-assessment* GCG pada beberapa bank besar juga menunjukkan fluktuasi skor, meskipun bank-bank tersebut rutin menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kualitas tata kelola benar-benar tercermin dalam luasnya keterbukaan pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, performa finansial perbankan Indonesia secara konsisten memperlihatkan tren peningkatan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, namun tingginya profitabilitas tidak serta-merta mendorong peningkatan pengungkapan aspek lingkungan dalam laporan keberlanjutan.

Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. (Wijaya, Ellesia, Shelly, & Velda, 2020) mengemukakan bahwasanya komite audit dan *governance committee* mempunyai dampak positif, sementara komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas tidak signifikan. Sebaliknya, (Anisa Anisa, Dirvi Surya Abbas, & Hustna Dara Sarra, 2023) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif, sedangkan (Kristianingrum, Sukesti, & Nurcahyono, 2023) membuktikan ROA mempunyai pengaruh konstruktif pada pengungkapan *sustainability report* di sektor manufaktur. (Sofa & Respati, 2020) serta (Sitanggang & Paramitadewi, 2023) menunjukkan peran komisaris independen bervariasi tergantung tekanan regulasi, sementara (Krisyadi & Elleen, 2020) dan (Rahaditama, 2022) menekankan pentingnya peran dewan direksi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap yang jelas: (1) sebagian besar studi terdahulu lebih banyak meneliti sektor

manufaktur, sementara sektor perbankan relatif jarang dikaji; (2) temuan studi mengenai dampak kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, serta ROA pada pengungkapan *sustainability report* masih inkonsisten; dan (3) terbatasnya penelitian yang menilai dampak penerapan POJK 51/2017 dalam konteks perbankan pasca implementasi.

Dengan dasar itu, studi ini mempunyai tujuan guna menguji pengaruh GCG yang diwujudkan dengan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan performa kerja finansial yang dikaji memanfaatkan ROA, pada pengungkapan *sustainability report* pada entitas bisnis subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019 - 2023.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menginterpretasikan korelasi antara perusahaan dengan sejumlah pihak yang berkepentingan pada aktivitasnya. Merujuk pada (Freeman, 1984), *stakeholder* ialah setiap perseorangan maupun organisasi yang mampu memberi pengaruh ataupun dipengaruhi oleh tercapainya tujuan organisasi. Seiring perkembangannya, teori ini dipandang sebagai kerangka holistik untuk memahami dan mengelola kebutuhan stakeholder di luar kepentingan pemegang saham, dengan tujuan memaksimalkan penciptaan nilai dan keberlanjutan jangka panjang (Mahajan, Lim, Sareen, Kumar, & Panwar, 2023).

Dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, hingga pemasok secara seimbang. Dengan demikian, teori pemangku kepentingan menjadi dasar logis pada studi ini guna menjelaskan bagaimana pengelolaan entitas bisnis dan kinerja keuangan dapat mendorong mutu pengungkapan *sustainability report*.

Sustainability Report

Mengacu pada GRI tahun 2020 *Sustainability report* ialah implementasi pengukuran, pengungkapan, serta akuntabilitas performa kerja lembaga pada *stakeholder*

internal ataupun eksternal sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan. (Beyne, Visser, & Allam, 2021) menegaskan bahwa laporan keberlanjutan memiliki peranan sebagai sarana perusahaan guna menunjukkan peranan nyata terhadap prinsip keberlanjutan, khususnya dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). (Pucker, 2021) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak cukup hanya menyoroti *outputs* kegiatan, melainkan harus berfokus pada *outcomes* dan *impacts* yang dihasilkan terhadap dimensi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dengan demikian, *sustainability report* dipandang sebagai instrumen penting bagi sebuah entitas bisnis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi di mata *stakeholder*.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) ialah sebuah himpunan aturan dan mekanisme yang mempunyai kendali dengan keterkaitan antara pemilik saham, pihak pengelola, pemberi pinjaman, pemerintah, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya guna menciptakan tata kelola entitas bisnis yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan patuh pada hukum dan regulasi (Suroso, 2022). Prinsip dasar GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran, yang berfungsi untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* sekaligus meningkatkan nilai perusahaan (Gusriandari, 2022). Pada studi ini, indikator GCG dikaji dengan kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan komisaris independen, karena ketiganya dipandang mampu merefleksikan fungsi supervisi dan pengendalian manajerial guna mendorong praktik tata kelola yang efektif.

Financial Performance

Kinerja keuangan adalah indikator kinerja yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mewujudkan sasaran yang sudah dirumuskan (Le, 2023). Salah satu ukuran yang umum dimanfaatkan guna menilai performa kerja finansial ialah ROA, yaitu rasio yang mengkaji besarnya pengembalian investasi yang diperoleh dari keseluruhan aset yang dikuasai perusahaan. Sejalan dengan itu,

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020) mendefinisikan ROA sebagai rasio yang mengindikasikan kecakapan entitas bisnis guna menciptakan keuntungan bersih dari total kepemilikan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Kepemilikan manajerial dipandang mempunyai dampak pada tingkat pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan *Stakeholder Theory*, manajer yang juga berperan sebagai pemilik memiliki kepentingan jangka panjang dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan, yang akhirnya akan mendorong guna menyampaikan informasi yang transparan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya kepemilikan manajerial mempunyai dampak yang bersifat konstruktif dan nyata pada pengungkapan laporan keberlanjutan (Anisa Anisa et al., 2023).

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin objektivitas serta meningkatkan keterbukaan informasi perusahaan kepada *stakeholder*. Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, keberadaan komisaris independen dapat memperkuat akuntabilitas manajemen, terutama terkait pengungkapan aspek sosial dan lingkungan. Temuan studi oleh (I. G. S. Putra, Santosa, & Juliantari, 2023) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai dampak positif dan signifikan pada pengungkapan *sustainability report*. H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

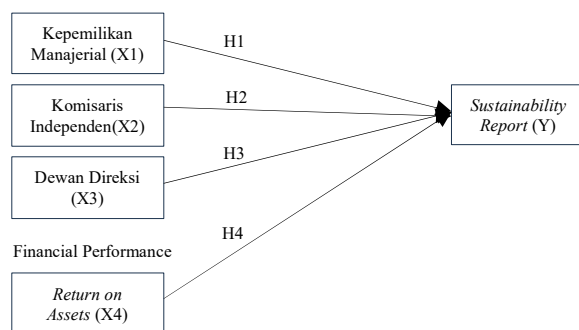
Dewan direksi memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Berdasarkan *Stakeholder Theory*, dewan direksi yang efektif dapat

memastikan kepentingan para stakeholder dipertimbangkan secara seimbang sehingga mendorong keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian (Irfan & Sarumpaet, 2023) mengemukakan bahwasanya dewan direksi memberi pengaruh positif dan bermakna pada pengungkapan *sustainability report*. H3: Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pengaruh ROA Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Kinerja keuangan yang dikaji dengan ROA menggambarkan kapabilitas entitas bisnis dalam menciptakan keuntungan melalui pemanfaatan keseluruhan sumber daya yang dikuasai. Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, entitas usaha yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar memiliki kemampuan yang lebih luas guna memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder*. Penelitian (Kristianingrum et al., 2023) menegaskan bahwasanya ROA mempunyai pengaruh positif dan nyata pada pengungkapan *sustainability report*. H4: *Return on Assets* (ROA) berpengaruh pada pengungkapan *sustainability report*.

Good Corporate Governance



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Data diolah (2025)

3. METODE PENELITIAN

Sampel

Studi ini memanfaatkan metode kuantitatif, yakni suatu metode ilmiah yang dilaksanakan secara terstruktur untuk menelaah komponen-komponen suatu fenomena beserta

keterkaitan sebab-akibat antar variabel, dengan tujuan membangun serta mengimplementasikan model matematis, teori, maupun hipotesis yang sejalan (Arifin, 2018). Fokus utama studi ini ialah mengkaji dampak kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan ROA pada pengungkapan *sustainability report*. Data yang dimanfaatkan ialah data sekunder yakni laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh entitas bisnis subsektor perbankan.

Populasi pada studi ini ialah keseluruhan entitas bisnis subsektor perbankan yang terdapat di BEI periode 2019–2023 dengan jumlah 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan ialah *purposive sampling*, yakni penetapan sampel berdasar pada karakteristik khusus yang sejalan dengan sasaran studi (Sugiyono, 2019).

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

Kualifikasi sampel	Jumlah
Perusahaan subsektor perbankan yang tercatat di BEI pada periode 2019-2023	43
Perusahaan yang menerbitkan <i>annual report</i> 2019-2023	(0)
Perusahaan yang menerbitkan <i>sustainability report</i> 2019-2023	(27)
Perusahaan yang tidak mengalami merger selama 2019-2023	(1)
Total sampel terpilih	15
Rentang tahun penelitian	5
Total sampel yang dipakai dalam penelitian (15x5)	75

Sumber: Data Olah (2025)

Pengukuran Variabel

Variabel pada studi ini terdapat dari empat variabel independen, yakni kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan *return on assets*. Di sisi lainnya, variabel dependennya adalah *sustainability report*. Tabel berikut menjelaskan definisi operasional masing-masing variabel dan cara pengukurannya.

Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Kepemilikan manajerial	Mengacu pada proporsi kepemilikan saham ekuitas yang dikuasai oleh manajer yang duduk di dewan direksi (Cho & Ryu, 2022)	$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{(\text{Jumlah Kepemilikan Manajerial})}{(\text{Total Saham Beredar})} \times 100\%$
Komisaris independen	Anggota Dewan Komisaris yang tidak berkaitan dengan finansial, pengelolaan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan kekeluargaan dengan pemilik saham pengendali atau anggota direksi / anggota dewan komisaris lain (POJK No. 33/POJK.04/2014))	$\text{Komisaris Independen} = \frac{(\text{Jumlah Komisaris Independen})}{(\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris})} \times 100\%$
Dewan direksi	Mempunyai wewenang serta kewajiban utuh atas tata kelola korporasi guna kepentingan perusahaan, dan menjadi perwakilan korporasi baik di dalam ataupun luar pengadilan (POJK No. 33/POJK.04/2014)	Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Total Anggota Dewan Direksi
<i>Return on assets</i>	indikator perbandingan yang menilai tingkat kecakapan perusahaan dalam menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aset yang dikuasainya (Astuti, Sembiring, Supitriyani, Azwar, & Susanti, 2021)	$\text{ROA} = \frac{(\text{Laba Bersih Sesudah Pajak})}{(\text{Total Aset})} \times 100\%$
<i>Sustainability report</i>	Laporan yang menyajikan performa ekonomi, sosial, serta lingkungan korporasi sebagai wujud transparansi kepada stakeholder (Marwa, Isyнуwardhana, & Nurbaiti, 2017).	$\text{SRDI} = \frac{n}{k}$

Metode Penelitian

Analisis data memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 26 untuk menjamin pengolahan data yang akurat dan efisien. Teknik analisis data yang dimanfaatkan ialah regresi linear berganda guna mengidentifikasi dampak dan korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Tahapan analisis meliputi: (1) uji statistik deskriptif; (2) uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas

dengan metode Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas melalui nilai tolerance dan VIF, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, serta uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson; (3) analisis regresi linear berganda; dan (4) pengujian hipotesis yang tersusun atas uji signifikansi simultan (uji F), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi 5% (Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev	Observations
KM	0.005	0.000	0.193	0.000	0.025	75
KI	0.543	0.500	0.750	0.250	0.084	75
DD	9.387	9.000	17.000	4.000	2.573	75

ROA	0.019	0.014	0.091	0.000	0.017	75
SR	0.349	0.316	0.940	0.034	0.230	75

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil tabel 3, jumlah observasi penelitian adalah 75. Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki skor minimum 0,000, skor maksimum 0,193, nilai mean 0,005, dan standar deviasi 0,025. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan manajerial pada perusahaan perbankan relatif sangat kecil, rata-rata hanya sekitar 0,5%. Komisaris Independen (KI) memiliki skor minimum 0,250, maksimum 0,750, mean 0,543, dan standar deviasi 0,084. Artinya, rata-rata komposisi komisaris independen pada sampel penelitian mencapai 54%, melebihi ketentuan minimum regulasi.

Dewan Direksi (DD) menunjukkan skor minimum 4, maksimum 17, mean 9,387, serta standar deviasi 2,573. Hal ini mengindikasikan bahwasanya rerata total anggota dewan direksi

adalah 9 orang, dengan variasi ukuran yang cukup besar antar perusahaan. Return on Assets (ROA) memiliki skor minimum 0,000, maksimum 0,091, mean 0,019, dan standar deviasi 0,017. Nilai mean ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan sampel relatif rendah, rata-rata hanya sekitar 1,9%. Sementara itu, Sustainability Report (SR) memiliki skor minimum 0,034, maksimum 0,940, mean 0,349, dan standar deviasi 0,230. Artinya, rata-rata tingkat pengungkapan sustainability report sebesar 34,9%, dengan sebaran data yang cukup bervariasi antar perusahaan.

Secara umum, nilai mean dari variabel penelitian diatas skor simpangan baku, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data bersifat relatif homogen.

Tabel 4 Uji Normalitas

N	Test Statistic	Sig. (2-tailed)	Remark
75	0.077	0.200	Data normally distributed

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal. Nilai Kolmogorov-Smirnov Asymp. Sig (2-tailed) sebanyak $0,200 > 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 diterima, sehingga residual berdistribusi normal dan model regresi mencukupi asumsi normalitas. Hal ini menegaskan bahwasanya data sudah mencukupi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka pada studi ini perlu dilaksanakan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang mencakup: uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang dilakukan diantaranya:

Tabel 5. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model	Durbin-Watson	Lower Bound (du)	Upper Bound (4-du)	Remark
1	1.870	1.739	2.261	No autocorrelation

Sumber: Data diolah (2025)

Temuan uji autokorelasi memanfaatkan uji Durbin-Watson (DW) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala autokorelasi. Nilai DW sejumlah 1,870 melebihi dari batas atas (du) 1,7390 dan dibawah $4 - 1,7390 = 2,2610$.

Dikarenakan skor DW ada pada rentang $1,7390 < 1,870 < 2,2610$, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar error dalam model regresi, sehingga observasi bersifat independen satu sama lain.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variable	Collinearity Tolerance	VIF	Remark
Managerial Ownership (X1)	0.790	1.267	No multicollinearity
Independent Commissioner (X2)	0.697	1.436	No multicollinearity
Board of Directors (X3)	0.786	1.272	No multicollinearity
Return on Assets (X4)	0.834	1.198	No multicollinearity

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji multikolinearitas mengindikasikan bahwasanya tidak ditemukan gejala multikolinearitas di antara variabel bebas. Seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 yaitu masing-masing 0,790 (X1), 0,697 (X2), 0,786 (X3), dan 0,834 (X4), serta nilai VIF dibawah dari 10 yaitu 1,267 (X1), 1,436 (X2), 1,272 (X3), dan 1,198 (X4). Oleh sebab itu, bisa dipastikan bahwasanya tidak ada hubungan kuat antar variabel bebas sehingga tiap-tiap variabel berkontribusi secara unik dalam menjelaskan variabel dependen tanpa terjadi redundansi.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Variable	Sig.	Remark
Managerial Ownership (X1)	0.228	No heteroscedasticity
Independent Commissioner (X2)	0.682	No heteroscedasticity
Board of Directors (X3)	0.614	No heteroscedasticity
Return on Assets (X4)	0.480	No heteroscedasticity

Sumber: Data diolah (2025)

Temuan uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu kepemilikan manajerial (X1) sebesar 0,228, komisaris independen (X2) sebesar 0,682, dewan direksi (X3) sebesar 0,614, dan return on assets (X4) sebesar 0,480. Selain itu, scatterplot memperlihatkan pola titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga mengonfirmasi bahwa model regresi bersifat homoskedastis.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient (B)	t-value	Sig.	Remark
(Constant)	-0.137	-4.126	0.000	
Managerial Ownership (X1)	2.792	13.807	0.000	Significant (+)
Independent Commissioner (X2)	0.694	11.067	0.000	Significant (+)
Board of Directors (X3)	0.004	2.086	0.041	Significant (+)
Return on Assets (X4)	0.922	3.288	0.002	Significant (+)
R-Square	0.788			Strong model

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasar pada temuan hasil analisis regresi pada Tabel di atas, didapatkan skor R-Square sejumlah 0,788, artinya bahwasanya 78,8% variasi pengungkapan *sustainability report* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan *return on assets*, sedangkan sisanya sebesar 21,2% dijabarkan oleh faktor lainnya di luar model.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya model regresi yang diterapkan mempunyai kekuatan penjelasan yang tinggi.

Secara parsial, variabel kepemilikan manajerial (X1) memiliki koefisien sebesar 2,792 dengan nilai t 13,807 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan *sustainability report*. Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya kian tinggi proporsi saham yang dimiliki manajer, kian besar juga derajat pengungkapan keberlanjutan yang dilaksanakan.

Komisaris independen (X2) mempunyai koefisien sebesar 0,694 dengan nilai t 11,067 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga terbukti berpengaruh konstruktif signifikan. Artinya, semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam struktur dewan, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk

mengungkapkan informasi keberlanjutan secara transparan.

Dewan direksi (X3) memiliki koefisien sebesar 0,004 dengan nilai t 2,086 dan signifikansi $0,041 < 0,05$, sehingga juga mempunyai pengaruh konstruktif dan bermakna. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan direksi, semakin efektif perusahaan dalam mengelola dan mendorong praktik pelaporan keberlanjutan.

Return on Assets (ROA) (X4) menunjukkan koefisien sebesar 0,922 dengan nilai t 3,288 dan signifikansi $0,002 < 0,05$, yang berarti ROA berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemampuannya dalam menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaporan keberlanjutan.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengaruh positif dan signifikan kepemilikan manajerial pada pengungkapan *sustainability report* dapat dijelaskan melalui perspektif *Stakeholder Theory*. Ketika manajemen mempunyai saham dalam perusahaan, mereka memiliki peranan ganda sebagai agen beserta prinsipal. Hal ini menciptakan insentif intrinsik untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak berkepentingan dengan penyajian laporan keberlanjutan secara lebih menyeluruh. Hasil ini konsisten dengan studi (Anisa Anisa et al., 2023), menegaskan bahwasanya kepemilikan manajerial memberi pengaruh positif dan nyata pada pengungkapan *sustainability report* pada entitas bisnis non-keuangan yang tercatat di BEI periode 2017–2021. Temuan serupa juga dikemukakan (Latifah, Rosyid, Purwanti, & Oktavendi, 2019), yang berpendapat bahwasanya ketika manajemen memiliki saham, mereka terdorong untuk lebih transparan dalam pelaporan demi mengoptimalkan citra korporasi di hadapan investor serta publik.

Teori Pemangku Kepentingan (Freeman, 1984) menuntut bahwasanya entitas bisnis bertanggungjawab pada sejumlah pemangku di

luar pemilik saham, meliputi karyawan, konsumen, kreditur, pemerintah, serta masyarakat. Ketika manajer menjadi pemegang saham, mereka memiliki pemahaman lebih menyeluruh mengenai dampak keputusan perusahaan terhadap seluruh kelompok pemangku kepentingan, karena kesejahteraan pribadi mereka terkait langsung dengan keberlanjutan jangka panjang dan reputasi perusahaan. Peran ganda ini meminimalkan permasalahan keagenan tradisional dengan menyesuaikan kepentingan manajerial dengan kesejahteraan pemangku kepentingan yang lebih luas, khususnya pada sektor perbankan di mana kepercayaan dan legitimasi menjadi kunci keberhasilan usaha.

Esensi dari temuan ini menunjukkan bahwa bahkan pada tingkat kepemilikan manajerial yang kecil (rata-rata 0,5% dalam sampel), perilaku manajer dapat berubah secara signifikan menuju transparansi keberlanjutan. Kondisi tersebut menegaskan bahwasanya mekanisme kepemilikan manajerial bukan semata-mata beroperasi melalui insentif finansial, tetapi juga melalui efek kepemilikan psikologis yang meningkatkan rasa tanggung jawab manajer terhadap seluruh pemangku kepentingan (Latifah et al., 2019). Dalam konteks perbankan Indonesia, temuan ini

menyiratkan bahwa *Employee Stock Ownership Programs* (ESOP) dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan tanpa harus menuntut transfer kepemilikan dalam jumlah besar, sehingga menjadi mekanisme tata kelola yang praktis dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komisaris independen terbukti mempunyai pengaruh konstruktif serta nyata pada pengungkapan *sustainability report*, mendukung peran mereka sebagai perwakilan pihak berkepentingan yang lebih besar, bukan semata pada pemilik saham mayoritas. Dengan proporsi rata-rata sebesar 54,28% yang melampaui persyaratan minimum regulasi, komisaris independen berperan sebagai katalis dalam menjamin bahwasanya bank bukan semata-mata bertumpu pada profitabilitas jangka pendek, melainkan juga mengindahkan konsekuensi sosial dan ekologis.

Temuan ini sejalan dengan (I. G. C. Putra, Santosa, & Juliantari, 2023), yang menemukan bahwasanya komisaris independen berdampak positif serta nyata pada pengungkapan *sustainability report* di perusahaan manufaktur tercatat BEI. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwasanya dengan adanya komisaris independen mampu mengoptimalkan kualitas pengawasan tata kelola dan mendorong pelaporan keberlanjutan yang lebih luas.

Kerangka *Stakeholder Theory* memberikan penjelasan mengapa komisaris independen mendorong transparansi dalam *sustainability report*. Komisaris independen secara definisi tidak mempunyai keterkaitan finansial, manajerial, kepemilikan saham, ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan ataupun pemilik saham, sehingga memungkinkan mereka bertindak sebagai wakil murni dari kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Gusriandari, 2022). Independensi ini memungkinkan mereka untuk menantang keputusan manajemen yang terlalu menitikberatkan keuntungan jangka pendek pemegang saham dengan mengorbankan pemangku kepentingan lain, sehingga mendorong terciptanya lingkungan tata kelola

yang lebih berorientasi pada pelaporan keberlanjutan.

Esensi temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan regulasi semata tidak cukup untuk menciptakan tata kelola yang efektif; kualitas dan tingkat independensi mekanisme pengawasanlah yang menentukan efektivitasnya dalam mendorong perilaku yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Fakta bahwa bank dengan proporsi komisaris independen lebih tinggi (melampaui batas minimum 50%) menunjukkan tingkat pelaporan keberlanjutan yang lebih baik, mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola meningkat secara non-linear seiring dengan meningkatnya independensi (I. G. C. Putra et al., 2023). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan regulasi dan desain tata kelola, yaitu bank perlu mempertimbangkan untuk melebihi batas minimum proporsi komisaris independen sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi di bidang keberlanjutan dan manajemen pemangku kepentingan.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan direksi menunjukkan pengaruh konstruktif dan nyata pada pengungkapan *sustainability report*, yang mengindikasikan bahwa ukuran dewan yang memadai (rata-rata 9,39 anggota) memungkinkan adanya spesialisasi dan distribusi tugas yang lebih baik dalam mengelola kompleksitas pemangku kepentingan. Dalam konteks industri perbankan yang sangat diatur dengan fungsi intermediasi vital, dewan direksi yang lebih besar mempunyai kemampuan guna mengalokasikan sumber daya khusus dalam pengelolaan dan pelaporan aspek keberlanjutan. Hasil ini ditunjang oleh (Irfan & Sarumpaet, 2023), menjabarkan bahwasanya dewan direksi mempunyai dampak positif dan nyata pada pengungkapan *sustainability report* pada korporasi tambang di Indonesia. Studi oleh (Krisyadi & Elleen, 2020) juga menunjukkan bahwa keterlibatan dewan direksi yang lebih tinggi pada penentuan keputusan berkaitan dengan perluasan pengungkapan *sustainability report* perusahaan.

Secara teoretis, *Stakeholder Theory* menjelaskan bahwasanya ukuran dewan direksi yang lebih besar mendukung pengoptimalan

pelaporan keberlanjutan melalui kapasitas yang lebih baik dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan yang beragam. Sebagai organ utama pengambil keputusan, dewan direksi dituntut untuk menyeimbangkan tuntutan berbagai pihak seperti pemegang saham, deposan, debitur, karyawan, regulator, dan masyarakat (Gusriandari, 2022). Dewan yang lebih besar memungkinkan adanya spesialisasi, di mana setiap anggota dapat mengembangkan keahlian dalam bidang tertentu seperti manajemen risiko lingkungan, penilaian dampak sosial, atau kepatuhan regulasi. Spesialisasi ini menjadi penting dalam sektor perbankan, di mana keputusan pinjaman dan investasi dapat memengaruhi berbagai pemangku kepentingan lintas waktu.

Esensi dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dalam pengelolaan keberlanjutan pada dasarnya merupakan fungsi dari kapasitas organisasi, bukan sekadar fungsi pengawasan. Hubungan positif antara ukuran dewan dan pelaporan keberlanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan kompleksitas pemangku kepentingan membutuhkan sumber daya manusia dan keahlian khusus yang hanya dapat dicapai melalui komposisi dewan yang memadai.

Hal ini menentang pandangan konvensional bahwa dewan berukuran kecil lebih efektif, setidaknya dalam konteks tata kelola keberlanjutan di mana keragaman kepentingan pemangku kepentingan menuntut keahlian yang luas. Bagi perbankan Indonesia, temuan ini menyiratkan bahwa strategi komposisi dewan sebaiknya menekankan pada kompetensi keberlanjutan dan representasi pemangku kepentingan di samping fungsi tradisional manajemen keuangan dan risiko.

Pengaruh *Return on Assets* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Return on Assets (ROA) terbukti mempunyai dampak konstruktif serta nyata pada pengungkapan *sustainability report*. Kondisi tersebut mencerminkan bahwasanya bank dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki slack resources yang memungkinkan investasi dalam sistem pelaporan keberlanjutan yang komprehensif. Kinerja keuangan yang baik menciptakan siklus positif di mana kesuksesan finansial menjadi dasar transparansi

keberlanjutan, yang pada gilirannya memperkuat reputasi dan keyakinan pihak terkait. Temuan tersebut selaras dengan studi (Kristianingrum et al., 2023), yang menjabarkan bahwasanya ROA mempunyai pengaruh konstruktif serta bermakna pada pengungkapan sustainability report pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2019–2021.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, performa finansial yang efektif menciptakan kondisi yang mendukung perilaku berorientasi pada pemangku kepentingan, termasuk pelaporan keberlanjutan. ROA yang tinggi mengindikasikan bahwasanya bank dapat menyeimbangkan tuntutan finansial dari berbagai pemangku kepentingan, seperti menyalurkan laba pada pemilik saham, suku bunga yang kompetitif bagi deposan, akses kredit yang memadai bagi debitur, serta stabilitas pekerjaan bagi karyawan (Brigham & Houston, 2014). Keberhasilan finansial ini menciptakan keleluasaan organisasi untuk diinvestasikan dalam aktivitas non-finansial, seperti pelaporan keberlanjutan, inisiatif lingkungan, dan program sosial. Selain itu, bank yang lebih menguntungkan juga menanggapi tuntutan yang semakin besar dari pihak terkait mengenai keterbukaan dan tanggung jawab sosial.

Esensi dari temuan ini menantang pandangan tradisional bahwa inisiatif keberlanjutan merupakan biaya yang dapat mengurangi kinerja keuangan. Sebaliknya, hasil studi ini menjelaskan bahwasanya kekuatan finansial dan transparansi keberlanjutan justru saling memperkuat. Bank dengan ROA yang tinggi tidak hanya mempunyai kapasitas lebih besar untuk berinvestasi dalam sistem pelaporan keberlanjutan, tetapi juga dorongan yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa kesuksesan finansial dicapai melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Siklus positif ini memiliki implikasi penting bagi implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, yaitu bahwa kebijakan regulasi sebaiknya tidak menempatkan profitabilitas dan transparansi keberlanjutan sebagai tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua elemen yang dapat saling mendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan ROA mempunyai pengaruh pada pengungkapan *sustainability report* pada perbankan Indonesia, sehingga tata kelola dan kinerja keuangan berperan saling melengkapi dalam mendorong transparansi keberlanjutan. Temuan ini berimplikasi praktis bagi regulator dan perbankan untuk memperkuat mekanisme tata kelola serta meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan guna membangun kepercayaan *stakeholder*.

Namun, penelitian ini terbatas pada subsektor perbankan periode 2019–2023 dan hanya menggunakan beberapa variabel tata kelola serta kinerja keuangan. Dengan demikian, penelitian berikutnya dianjurkan melakukan perluasan sektor, periode, serta menambah variabel lain contohnya kepemilikan institusional, komite audit, maupun faktor eksternal agar pemahaman mengenai determinan *sustainability report* semakin komprehensif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Anisa, Dirvi Surya Abbas, & Hustna Dara Sarra. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Tipe Industri dan Umur Perusahaan Terhadap Sustainability Reporting. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(4), 251–263.
<https://doi.org/10.59841/excellence.v1i4.597>
- Arifin, Z. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Lentera Cendekia.
- Astuti, Sembiring, L. D., Supitriyani, Azwar, K., & Susanti, E. (2021). Analisis Laporan Keuangan. In *Media Sains Indonesia*.
- Beyne, J., Visser, W., & Allam, I. (2021). Sustainability Reporting in the Antwerp Port Ecosystem, Belgium: Understanding the Relationship Between Reporting on the Sustainable Development Goals and Integrated Thinking. *Frontiers in Sustainability*, 2(September), 1–11.
<https://doi.org/10.3389/frsus.2021.689739>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). *Fundamentals of Financial Management*. Boston: Cengage Learning.
- Buallay, A. (2020). Sustainability reporting and firm's performance: Comparative study between manufacturing and banking sectors. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(3), 431–445.
<https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2018-0371>
- Cho, J., & Ryu, H. (2022). Impact of Managerial Ownership on Corporate Social Responsibility in Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9), 1–14.
<https://doi.org/10.3390/su14095347>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing Inc.
- Gusriandari, N. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 123–135.
- Irfan, S., & Sarumpaet, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Diversitas Gender Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 334–355.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1441>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*.
- Kristianingrum, S., Sukesti, F., & Nurcahyono, N. (2023). Pengaruh ROA, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 45–58.
- Krisyadi, R., & Elleen, E. (2020). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Global Financial Accounting Journal*, 4(1), 16.
<https://doi.org/10.37253/gfa.v4i1.753>
- Latifah, S. W., Rosyid, M. F., Purwanti, L., & Oktavendi, T. W. (2019). Analysis of Good Corporate Governance, Financial

- Performance and Sustainability Report. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 200. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8902>
- Le, T. T. (2023). Corporate social responsibility and SMEs' performance: mediating role of corporate image, corporate reputation and customer loyalty. *International Journal of Emerging Markets*, 18(10), 4565–4590. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2021-1164>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166(June), 114104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Marwa, A., Isyнуwardhana, D., & Nurbaiti, A. (2017). Intangible Asset, Profitabilitas, Dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 79–87. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.582>
- Pucker, K. P. (2021). Overselling sustainability reporting. *Harvard Business Review*, 99, 134–143.
- Putra, I. G. C., Santosa, M. E. S., & Juliantari, N. K. D. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Komisaris Independen Terhadap Sustainability Reporting Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 22(1), 18–29. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.18-29>
- Putra, I. G. S., Santosa, M. E. S., & Juliantari, N. K. D. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Komisaris Independen Terhadap Sustainability Reporting Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Wacana Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 18–29. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.18-29>
- Rahaditama, M. W. (2022). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN TATA KELOLA ORGANISASI TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING Oleh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 154–165.
- Sitanggang, D. O., & Paramitadewi, S. D. S. L. (2023). Peran Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance Pada Pengungkapan Sustainability Report. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 19(2), 226–240. <https://doi.org/10.25170/balance.v19i2.3847>
- Sofa, F. N., & Respati, N. W. (2020). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 39.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suroso, S. (2022). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Pasuruan: Qiara Media.
- Tsabittha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 117–123.
- Wijaya, T., Ellesia, B. G., Shelly, L., & Velda, V. (2020). the Effect of Good Corporate Governance and Financial Performance on Disclosure of Sustainability Report. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 5(2), 85–95. <https://doi.org/10.31002/rak.v5i2.3654>